

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Jambi.

Pada dasarnya Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renja juga dijadikan acuan OPD dalam rangka pencapaian target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Selain itu, Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD serta untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan rancangan Renja-SKPD Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2018 ini merupakan dokumen rencana kerja tahun ke 4 pelaksanaan Renstra-SKPD Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021, dengan visi JAMBI TUNTAS 2021.

Dalam penyusunan rancangan Renja-SKPD Dinas Nakertrans Provinsi Jambi Tahun 2019, berbagai aspek terkait dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan di tahun mendatang.

2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada APBD Tahun 2019.

Oleh karenanya, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2019, secara garis besar dimaksudkan untuk :

- 1) Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 2) Menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui perencanaan tahunan yang lebih responsif guna menyelaraskan pelaksanaan program yang telah dilakukan sebelumnya dan berupaya untuk meningkatkan pencapaiannya pada tahun

pelaksanaan Renja 2019, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Nakertrans Provinsi Jambi.

- 3) Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD ini adalah untuk merealisasikan Program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) yang akan ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2019, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

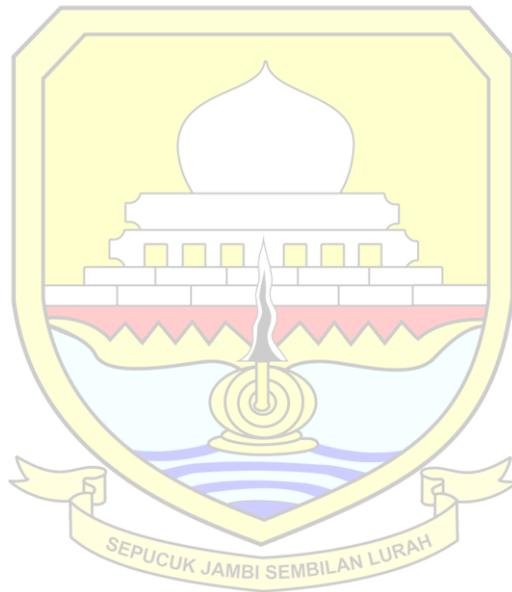
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu atau tahun sebelumnya, ditujukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan Rencana Kerja yang mampu direalisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dengan membandingkan antara target/rencana yang ingin dicapai dengan pencapaian realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

a. Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2017

Sektor Ketenagakerjaan merupakan sektor strategis dan sangat prioritas, dimana sektor ini memegang peranan penting terutama dalam upaya menurunkan angka pengangguran, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

jumlah pengangguran di Provinsi Jambi, terus menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya, dimana bila dibandingkan dengan angka pengangguran nasional yang mencapai 5,70 persen pada posisi pebruari 2014, maka pengangguran di Provinsi Jambi masih berada dibawah rata-rata nasional, yakni sebesar 4.34% pada Agustus 2015 menjadi 3.87% pada Agustus 2017.

Namun demikian, baik nasional maupun Provinsi Jambi, rata-rata penduduk yang bekerja masih didominasi oleh pendidikan SD ke bawah, kondisi ini yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga

kerja, yang sama-sama dimaklumi bahwa sektor ini sebagian besar bekerja pada sektor informal.

Upaya dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Nakertrans Provinsi Jambi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran terus dilakukan, sejalan dengan kebijakan Jambi TUNTAS 2021 dalam menurunkan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja (pro job). Dalam hal penciptaan lapangan kerja bagi pengangguran di Provinsi Jambi, peran instansi Dinas Nakertrans Provinsi Jambi adalah menyusun rumusan kebijakan perencanaan tenaga kerja, serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, pelatihan produktivitas, pembentukan wirausahawan baru, pelatihan bagi pencari kerja di BLK, dan pelatihan yang berbasis masyarakat, program pemagangan dalam negeri dan seleksi program pemagangan ke luar negeri. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah bertekad akan meningkatkan jumlah sekolah kejuruan dan diharapkan kondisinya bisa berbanding 70 persen untuk SMK dan 30 persen untuk SMU.

Dalam Program Peningkatan kesempatan kerja, dari target awal Renstra Tahun 2010, Dinas Nakertrans telah menargetkan penempatan tenaga kerja yang terdaftar, baik melalui Bursa Kerja On Line (BKOL), Pengantar Kerja dan Job Fair yang diselenggarakan selama 3 tahun terakhir, sebanyak 10.300 orang tenaga kerja, hingga akhir tahun 2017 jumlah tersebut akan melampaui target yakni sebanyak 15 ribu lebih, atau 150 persen.

b. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2017

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2017 melalui dana APBD Provinsi Jambi mendapatkan anggaran untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketenagakerjaan sebesar Rp.4.723.737.600,- dengan

realisasi Rp. 4.346.378.703,- (92,01%) dengan realisasi fisik 95%, untuk mendanai 3 program yaitu: 1) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2) Program peningkatan kesempatan Kerja dan 3) program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Dengan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dari 45.947 orang pada tahun 2016 turun menjadi 39.270 orang pada tahun 2017.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Outcome dari Program ini adalah meningkatnya kualitas, produktivitas dan kuantitas tenaga kerja/calon tenaga kerja atau pencari kerja pada berbagai bidang keterampilan. Besarnya anggaran yang tersedia untuk program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebesar Rp.2.267.852.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.183.198.000,- (96,27 %) dengan realisasi fisik sebesar 90.45 %. Untuk mewujudkan sasaran program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja (MTU) dengan total anggaran Rp.300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.282.353.825,- (94,11%) realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini antara lain terlatihnya 48 orang. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Tersedianya tenaga kerja terampil sebanyak 48 orang.
- 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja berbasis Kompetensi (PBK) dengan total anggaran Rp.900.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.895.924.980,- (99,55%) realisasi fisik

100%. Output dari kegiatan ini antara lain terlatihnya tenaga kerja terampil sebanyak 144 orang. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlatihnya tenaga kerja terampil sebanyak 144 orang.

- 3) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif dengan dana sebesar Rp.345.000.000,- dengan realisasi Rp.340.194.717,- (98,61 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Pos anggaran kegiatan ini digunakan antara lain untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium narasumber/instruktur, belanja ATK, dokumentasi bahan praktek, biaya transport, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output kegiatan terlaksananya pelatihan kewirausahaan produktif bagi 180 orang masing-masing di Kabupaten Batang Hari, Tanjab Barat , Muaro Jambi, Kota Jambi, Sarolangun, Tebo, Kerinci, Merangin. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas wirausahawan dalam menjalankan usahanya serta mendorong minat masyarakat menjadi pengusaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 4) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas tenaga kerja dengan dana sebesar Rp.240.000.000,- dengan realisasi Rp.239.942.200,- (99,98%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Pos anggaran pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlatihnya peserta sebanyak 80 orang tentang peningkatan produktivitas. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas

perusahaan masyarakat menjadi pengusaha yang handal, mampu dan menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

- 5) Kegiatan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri dengan total anggaran Rp.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.137.286.690,- (91,52%) realisasi fisik 100 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peserta magang ke Jepang dan input dari kegiatan ini adalah berkurangnya jumlah pengangguran.
- 6) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dengan bahasa asing bagi calon tenaga kerja magang ke luar negeri dengan total anggaran sebesar Rp. 182.852.000,- dan terealisasi sebesar Rp.179.387.000,- (98,11%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Pos anggaran pada kegiatan ini antara lain untuk insentif pengelola kegiatan, nara sumber, instruktur, ATK, dokumentasi bahan praktek, biaya transport, makan-minum dan perjalanan dinas sedangkan output dari kegiatan ini adalah persiapan calon peserta magang ke Jepang dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan.
- 7) Kegiatan sertifikasi Kopetensi bagi instruktur, tenaga kerja dan perusahaan non kontrstuksi dengan dana sebesar 150.000.000,- dengan realisasi 108.126.545,- (72,08%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memperoleh sertifikasi uji kompetensi dan instruktur mempunyai kemampuan yang kompeten.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh; Kegiatan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri dan Monitoring Penggunaan TKA;Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penempatan;Kegiatan Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; Kegiatan Penyusunan Program, RTKD dan Analisa keberhasilan program dan penyusunan profil Ketenagakerjaan; Kegiatan Pengiriman dan Penempatan TKI Ke Malaysia dan Koordinasi Penempatan TK ke Luar Negeri; dan Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK). Outcome (sasaran) dari program ini diharapkan menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya peluang dan kesempatan kerja. Total dana yang disediakan untuk Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebesar Rp.1.250.881.000,- dengan realisasi Rp.1.197.894.956,- (95,76%) dengan realisasi fisik 100 % untuk mendanai kegiatan.

1. Kegiatan Pameran Bursa Kerja dengan total dana sebesar Rp.188.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 183.501.400,- (97,61%) dan realisasi fisik 100 %. output dari kegiatan ini adalah dipertemukanya pengguna tenaga kerja dan pencari tenaga kerja. Dan outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya pameran Bursa kerja (JOB FAIR) tahun 2017.
2. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB) dengan total dana sebesar Rp.128.775.000,- dengan realisasi dana Rp. 123.849.528,- (96,45%) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan,

honorarium narasumber, ATK, biaya makan-minum pertemuan, serta bantuan barang kepada kelompok usaha bersama (WUB) sebanyak 40 orang masing-masing digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan wirohannya agar mampu berkembang dengan baik, dengan output terlaksananya pemberian bantuan bimbingan manajemen dan bantuan kepada WUB.

3. Kegiatan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar negeri, dengan total dana sebesar Rp.221.247.000,- dengan realisasi dana Rp. 217.332.828,- (98,23%) dan realisasi fisik 100, %. (outcome) kesempatan kerja dalam dan luar negeri dan output dari kegiatan ini adalah berkurangnya jumlah pengguran.
4. Kegiatan Penyuluhan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke Luar Negeri dengan total dana sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 85.905.200,- (85,91%) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran kegiatan ini digunakan antara lain untuk ATK, biaya makan minum, narasumber, dan perjalanan dinas, dengan output Jumlah CTKI yang memperoleh penyuluhan penempatan tenaga kerja ke luar negeri ke Jepang (Mahasiswa Tingkat Akhir Akper 345 org, 6 Akper di 3 Kab/Kota).output dari kegiatan ini adalah penyebaran luasan informasi peluang TKI Tenaga perwat lansia ke Jepang dan tersedianya calon TKI dan tenaga perawat ke Jepang.
5. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Sektor formal dan Informal dengan total dana sebesar Rp. 39.774.000,-,- dengan realisasi dana Rp. 38.091.600,- (95,77%) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium narasumber, ATK, biaya

makan-minum pertemuan. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini jumlah tenaga kerja yang telah di bina di sector formal dan informal.

6. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang penempatan dengan dana Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp. 41.458.200,- (82,93%), realisasi fisik 86,97%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk sosialisasi peraturan Perundang-undangan dibidang penempatan dengan jumlah peserta 50 perusahaan dengan narasumber dari Direktorat PTA Kementerian Nakertrans RI. Peserta berasal dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi serta dari Dinas Kabupaten/Kota, dengan output tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dibidang penempatan kepada 60 perusahaan dan Petugas Kab/Kota pada tahun 2015. Adapun kegiatan yang didanai melalui kegiatan ini antara lain untuk uang transport, Uang Saku peserta, Konsumsi, Honor dan Transport Narasumber pusat, ATK. Sasara (outcome) dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman terhadap peraturan tersebut yang pada gilirannya mengurangi angka pengangguran.
7. Kegiatan Pengembangan Masyarakat melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan dana sebesar Rp.148.085.000,- realisasi Rp. 144.701.900,- (97,72%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk pelatihan melalui penerapan TTG dengan output terlatihnya masyarakat pencari kerja tentang Teknologi Tepat Guna sebanyak 60 orang dan dilaksanakan di Kab. Bungo dan Kota Jambi sebanyak 3 paket. Setelah pelatihan peserta 60 orang diberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi pencari kerja

8. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) dengan dana Rp.50.000.000,-dengan realisasi Rp. 48.415.700,- (96,83%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk pembayaran honorarium pengelola data, analisa data, pengolah IPK Kabupaten/Kota dengan output tersedianya data IPK untuk 12 bulan. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini tersedianya data IPK yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan informasi pasar kerja.
9. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis program penempatan dan perluasan Kesempatan Tenaga Kerja dengan total dana sebesar Rp.45.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 40.558.500,- (100%) dan realisasi fisik 100 %. (outcome) dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi pelaksanaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
10. Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Sarjana dengan total dana sebesar Rp.280.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 274.080.100,- (97,98%) dan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran yang tersedia pada kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium narasumber, ATK, biaya makan-minum pertemuan, sosialisasi peraturan Perundang-undangan, dengan output Jumlah data Tenaga Kerja Sarjana sebanyak 12 orang. (outcome) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendamping tenaga kerja sarjana sebagai pendamping Masyarakat.

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui kegiatan Pembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak serta UMP dan Bimtek Survey KHL dan Pengupahan (UMP); Pengembangan

Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit; Pelaksanaan Program PBTA dalam rangka implementasi RAD PBPTA, Sosialisasi Perpu Ketenagakerjaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2017 dan Pengujian Lingkungan Tenaga Kerja. Outcome yang diharapkan dari program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ini adalah 1) meningkatnya peran kelembagaan perlindungan ketenaga kerjaan dalam mendorong partisipasi aktif tenaga kerja dan dunia usaha dan 2) meningkatkan peran dan fungsi pengawasan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan dunia usaha.

Untuk menjalankan program ini telah dianggarkan dana APBD Provinsi Jambi tahun 2017 sebesar Rp.1.205.004.000,- dengan realisasi sebesar Rp.965.285.680,- (80,11%) dengan realisasi fisik 85,03%. Secara rinci kegiatan yang dilaksanakan melalui program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2017 dan pengujian lingkungan kerjadengan dana Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp. 59.006.020,- (59,01%) dengan realisasi fisik 63,99%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan/narasumber/instruktur, penyediaan ATK, transportasi dan perjalanan dinas. Sedangkan output utama dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan bulan K3 Tahun 2016 dan Pengujian Lingkungan kerja. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat pekerja/buruh dan perusahaan dalam mengimplementasikan K3 dalam lingkungan kerja, sehingga dapat meminimalisir terjadinya masalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja. hal ini di sebabkan Karena Rasionalisasi Anggaran dan Save

Blocking Surat Edaran Nomor.32/SE/TAPG/2016 tanggal 2 September 2016.

- 2) Kegiatan Pembahasan dan Penetapan serta UMP dengan dana Rp.185.004.000,- dengan realisasi Rp.180.044.019,- (95,06%) dengan realisasi fisik 100 %. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, narasumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya pembahasan UMP. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah penetapan UMP tahun 2017 serta pengupahan UMP dibidang Hubungan Industrial.
- 3) Kegiatan Pengawasan Pekerja anak dengan dana Rp.60.000.000,- dengan realisasi Rp.32.610.000,- (56,35%) dengan realisasi fisik 60,62 %. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, narasumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya pengawasan norma ketenagakerjaan di bidang perlindungan tenaga kerja perempuan.
- 4) Kegiatan Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit dengan dana Rp.160.000.000,- dengan realisasi Rp.159.992.200,- (100,00%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium kelompok kerja Tripartit, instruktur, ATK, makan-minum rapat dan perjalanan dinas dengan output terlaksananya mekanisme lembaga kerjasama tripartit yang saling bersinergi dan saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah terciptanya ketenangan bekerja dan berusaha bagi pekerja dan pengusaha (perusahaan) selama tahun 2017.

- 5) Kegiatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dengan dana Rp. 300.000.000,- dengan realisasi Rp. 176.213.733,- (58,74%) dengan realisasi fisik 61,95%.
- 6) Kegiatan Penegak hukum/penyidikan di Bidang Ketenagakerjaan dengan dana Rp.60.000.000,- dengan realisasi Rp.42.880.000,- (71,47%) dengan realisasi fisik 80,00%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, honorarium kelompok kerja Tripartit, instruktur, ATK, makan-minum rapat dan perjalanan dinas dengan ouput terlaksananya mekanisme lembaga kerjasama tripartit yang saling bersinergi dan saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha. Sasaran (outcome) dari kegiatan ini adalah kesejahteraan tenaga kerja.
- 7) Kegiatan Pembinaan Hubungan Industri, UMP dan BPJS diperusahaan di Kab/ Kota dengan dana sebesar Rp. 80.000.000,- dengan realisasi Rp. 78.394.500,- (97,99%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, narasumber, instruktur, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas dengan ouput terlaksananya pembahasan UMP . Sasaran (outcome) dari kegiatan ini tidak terjadinya multi tafsir tentang pengertiann UMP.
- 8) Kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) dengan dana sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi Rp. 139.760.756,- (87,35%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, narasumber, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas, (outcome) dari kegiatan ini Peningkatan kompetensi tenaga kerja diperusahaan dalam upaya meningkatkan penerapan K3.

- 9) Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp. 96.384.471,- (96,38%) dengan realisasi fisik 100%. Pos anggaran kegiatan ini antara lain digunakan untuk insentif pengelola kegiatan, narasumber, ATK, dokumentasi, makan-minum dan perjalanan dinas, (outcome) dari kegiatan terwujudnya tempat kerja aman dan sehat.

3) Bidang Transmigrasi

Program Transmigrasi bertujuan mengurangi kesenjangan penduduk antar wilayah/kawasan di Provinsi Jambi, meningkatkan keberdayaan masyarakat di lokasi transmigrasi dan masyarakat di kawasan terpadu mandiri (KTM) serta penyiapan areal transmigrasi yang potensial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, program dan kegiatan di lokasi transmigrasi dan KTM diarahkan kepada penguatan ekonomi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan transmigrasi. Pada tahun anggaran 2017, kegiatan ketransmigrasian yang dilaksanakan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui APBD Provinsi Jambi sebanyak 1 program dan 11 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 696.692.500,-. Dari anggaran yang disediakan untuk kegiatan ketransmigrasian, sampai dengan tanggal 31

Desember 2017 telah terealisasi mencapai Rp. 626.708.661,- atau sebesar 89,95% dengan realisasi fisik sebesar 90 %, karena ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual, Pemerdayaan prempuan transmigrasi di UPT.

Pembinaan kepada peserta transmigrasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi usaha tani, keterampilan, penguasaan teknologi, pengorganisasian masyarakat, pembangunan jejaring kerja dan pembinaan mental spiritual. Pembinaan mental dan spiritual memiliki arti penting guna membangun rasa bersyukur dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu pembinaan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan toleransi diantara sesama peserta transmigrasi maupun dengan masyarakat disekitar kawasan transmigrasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif. Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan dasar yang dibutuhkan masyarakat transmigran di UPT Target 3 PKT Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-. Sampai akhir tahun 2017 dana yang terserap untuk kegiatan ini mencapai Rp. 69.541.450,- atau sebesar 99,34 % dengan realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigrasi dan Peternakan.

Mendukung kegiatan pengembangan hasil produksi pertanian dan peternakan di lokasi transmigrasi tahun 2017, disediakan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan populasi ternak masyarakat transmigrasi. Penyerapan anggaran kegiatan ini hanya mencapai sebesar Rp. 66.055.800,- atau (82.57%).

3. Kegiatan Pengendalian Obat di Gudang Farmasi Kabupaten dan peralatan pustu.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di lokasi transmigrasi melalui ketersediaan obat yang dibutuhkan, dilaksanakan kegiatan pengendalian obat di gudang farmasi kabupaten. Melalui ketersediaan obat yang dibutuhkan masyarakat akan

mempermudah petugas kesehatan memberikan layanan sesuai standar pelayanan kesehatan melalui Pustu. Kegiatan ini menyediakan anggaran sebesar Rp. 47.500.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp.46.768.050.- atau 98,46 % dengan realisasi fisik 100%.

4. Kegiatan Penanganan Permasalahan di Lokasi Transmigrasi.

Dalam rangka mereduksi timbulnya permasalahan di lokasi transmigrasi, perlu dilakukan upaya preventif melalui pembinaan masyarakat di lokasi transmigrasi secara berkesinambungan. Pembinaan tersebut dengan melebur dan menghilangkan dikotomi kultur antara sesama warga transmigrasi maupun dengan masyarakat disekitar lokasi transmigrasi. Selain upaya preventif, upaya membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di lokasi transmigrasi seperti pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat; merupakan sarana untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi. Dengan melaksanakan pertemuan berkala semua pemangku kepentingan akan dapat mengeliminir timbulnya permasalahan dan mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat dan damai. Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 63.000.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp. 56.884.145,- atau 90,01 % dengan realisasi fisik 88,26%.

5. Kegiatan Publikasi Melalui Informasi Promosi Potensi Lokasi dan Kerjasama antar Daerah.

Potensi di lokasi transmigrasi yang belum diolah merupakan sumberdaya yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut dibutuhkan

investor yang mau menanamkan modalnya. Guna menarik minat investor perlu dilakukan promosi potensi yang ada di lokasi transmigrasi. Kegiatan promosi potensi kawasan transmigrasi disediakan dana sebesar Rp. 65.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk membiayai promosi melalui media massa dan mengikuti event-event promosi. Selain itu membangun jaringan kerjasama antar daerah pengelola transmigrasi dan daerah lain diharapkan mampu menarik minat investor di lokasi transmigrasi. Realisasi kegiatan ini mencapai Rp. 54.425.000,- atau sebesar 83,73 % dengan realisasi fisik 90,99%.

6. Kegiatan Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan diversifikasi usaha dan pemanfaatan potensi lokal, perlu diberikan penguatan keahlian sumberdaya manusia melalui pelatihan home industri. Pelatihan diberikan dengan mempertimbangkan potensi bahan baku, nilai tambah produk dan pemasaran produk. Untuk menyelenggarakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 60.815.000,-, dan telah terserap sebesar Rp.57.209.750,- atau 94,07 % dengan realisasi fisik 100%.

7. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigrasi di UPT.

Derajat kesehatan masyarakat di lokasi transmigrasi perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh akan tujuan program transmigrasi dapat tercapai. Derajat kesehatan ini dipengaruhi oleh perilaku, budaya, kondisi lingkungan dan pola konsumsi dan gizi masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2016, kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat,

lingkungan dan gizi berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara lengkap dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, petugas medis dan peralatannya. Selain itu upaya penyehatan lingkungan pemukiman transmigrasi dan peningkatan gizi masyarakat akan mengurangi kasus kesehatan yang dialami masyarakat. Mendukung kegiatan ini telah disediakan dana sebesar Rp. 24.142.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp.23.594.750,- atau mencapai 97,78 % dengan realisasi fisik 100%.

8. Kegiatan Penyiapan Areal Transmigrasi.

Untuk mengeliminir timbulnya konflik batas wilayah kawasan transmigrasi dengan masyarakat maupun pengusaha di sekitar kawasan transmigrasi, perlu ditetapkan batas definitif kawasan transmigrasi. Penetapan batas definitif tersebut selain tertuang dalam peta juga mempunyai batas yang jelas di lapangan yang dapat diketahui secara akurat. Oleh karena itu perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya sehingga hasil penetapan dapat disepakati dan diterima. Penetapan batas dilakukan tidak saja sebelum penetapan kawasan transmigrasi, namun juga dilaksanakan bagi kawasan transmigrasi yang belum memiliki batas-batas yang kongkrit. Kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp.214.040.000,-, dan telah terserap sebesar Rp. 210.599.554,- atau 98,37%.

9. Kegiatan Monitoring Pembangunan Pemukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS.

Untuk menjaga agar proses pembangunan pemukiman dan STP transmigrasi berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun, perlu dilakukan monitoring secara berkala. Untuk kegiatan monitoring ini

disediakan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 21.585.000,- atau mencapai 43,17 %.

10. Kegiatan Monitoring Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Terlaksananya monitoring Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Sasaran (outcome) terwujudnya peningkatan perkembangan Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dialokasikan dana melalui APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 22.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 20.085.000,- atau 91,30%, dengan realisasi fisik 100%.

Untuk menentukan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja OPD Tahun 2019 berdasarkan RKPD Tahun 2019, maka dapat di riview dari rencana target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas Nakertrans Tahun 2016-2021.

Berikut disajikan tabel target dan rencana kinerja tahun 2018 pada Bidang/UPTD/Sekretariat pada Dinas Nakertrans Provinsi Jambi, yang diuraikan pada tabel berikut :

**RIVIEW TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2018
BIDANG KETENAGAKERJAAN**

BIDANG PPTKP

TARGET SASARAN : PENEMPATAN TENAGA KERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-----	---------	-------------------	--------

25

Rancangan Akhir Renja Tahun 2019

PROGRAM/KEGIATAN				
(1)	(2)	(3)		(4)
I	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran	Terwujudnya penurunan angka pengangguran dan Meningkatnya peluang dan kesempatan kerja		25%
1	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja	1	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan dalam dan luar negeri Jumlah dokumen laporan Informasi Pasar Kerja (IPK)	3.000 org
2	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja	2	Jumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) bagi Tenaga Perawat dan Perawat Lansia yang memperoleh pengetahuan	200 org
3	Terwujudnya Peningkatan pengetahuan stake holder dalam mekanisme ketenagakerjaan	3	Jumlah Pengusaha Pengguna Tenaga Kerja yang memperoleh pengetahuan dalam bidang penempatan	30 org

TARGET SASARAN : PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja	Terwujudnya penurunan angka pengangguran dan Meningkatnya peluang dan kesempatan kerja	25%
1	Terwujudnya pembentukan WUB dalam	1 Jumlah Kelompok Wirausaha Baru (WUB) yang terbentuk	40 org

	mendorong penciptaan kesempatan kerja		
2	Terwujudnya perkembangan kelompok usaha dalam masyarakat	2	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring sektor usaha informal 1 dok
3	Terwujudnya peningkatan pendapatan pekerja dalam memanfaatkan penggunaan teknologi yang lebih produktif dan efisien	3	Jumlah masyarakat yang memperoleh pengembangan usaha melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) berupa bantuan pelatihan dan peralatan kerja (Tolkit) 40 org
4	Terwujudnya kemandirian tenaga kerja sarjana dalam penciptaan kesempatan kerja	4	Jumlah TKS yang di dayagunakan dalam sektor usaha 12 org

TARGET SASARAN : PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja	Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik	2,3%
1	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja dalam berusaha yang berkualitas	1 Jumlah calon wirausaha yang memperoleh bekal keterampilan yang produktif	120 org
2	Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam berusaha	2 Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan produktivitas	100 org
3	Terwujudnya peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri	3 Jumlah tenaga kerja yang memperoleh program magang ke perusahaan dalam dan luar negeri	50 org
		4 Jumlah Calon peserta magang dan tenaga kerja yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing	96 org

4	Terwujudnya sertifikasi kompetensi instruktur dan lulusan pelatihan kerja	5	Jumlah Tenaga Kerja yang memperoleh sertifikasi kompetensi kerja	39 org
---	---	---	--	--------

**BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAN
DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

TARGET SASARAN : PENERAPAN SMK3 DAN K3

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan peningkatan SDM Tenaga Kerja	Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi pengawasan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan dunia usaha	60 %
1	Terwujudnya peningkatan penerapan K3 bagi perusahaan yang mempekerjakan para tenaga kerja	1 Jumlah paket kegiatan bulan K3 dan perusahaan yang diberi penghargaan 2 Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan K3 Umum di Perusahaan	60 Perusahaan 20 Org
2	Terwujudnya pengetahuan perusahaan terhadap norma-norma dalam bidang ketenagakerjaan	3 Jumlah perusahaan yang diberikan sosialisasi dan dilakukan pengawasan terhadap penerapan Norma-norma ketenagakerjaan	20 Perusahaan
3	Terwujudnya kualitas uji peralatan di perusahaan	4 Jumlah perusahaan dan lingkungan kerja yang dilakukan pengawasan dan pengujian	1 paket

TARGET SASARAN : PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
I	Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan peningkatan SDM Tenaga Kerja	Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi pengawasan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dan dunia usaha		60 %	
1	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja	1	Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan	1	kasus
2	Terwujudnya kesadaran perusahaan terhadap resiko mempekerjakan Anak	2	Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi PBPTA	20	org

TARGET SASARAN : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
I	Terwujudnya ketersediaan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja	Terwujudnya Peningkatan Kepersertaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja		3,17%	
1	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan	1	Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan program Perlindungan ketenagakerjaan dalam rangka mendorong terwujudnya pemberian jaminan sosial	50	Org/perusahaan

II	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja	Terwujudnya peningkatan hubungan yang harmonis, ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja	3,5%
1	Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Pekerja	1 Jumlah UMP yang diberlakukan pada Tahun 2018	1 Tahun UMP
2	Terwujudnya penyelesaian kasus-kasus Hubungan Industrial melalui penyelesaian bersama	2 Jumlah Lembaga Kerjasama yang diberdayakan	1 Dok

**RIVIEW TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2018
BIDANG TRANSMIGRASI**

TARGET SASARAN : PENEMPATAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ Ditempati warga transmigran yang kondusif	Terwujudnya peningkatan pemberdayaan ekonomi pada kawasan UPT dan KTM serta penyiapan areal transmigrasi	77%
1	Tersedianya cadangan areal yang disediakan	1 Jumlah dokumen areal transmigrasi yang direncanakan	2 dok
II	Terwujudnya Kesejahteraan Warga Tansmigran	Terwujudnya peningkatan pemberdayaan ekonomi pada kawasan UPT dan KTM serta penyiapan areal trasmigrasi	77%
1	Terwujudnya keserasian dan keselarasan hidup warga transmigran	1 Jumlah pembinaan yang dilakukan pada UPT yang ditempati warga transmigran	1 UPT BINA

2	Terwujudnya pembangunan kawasan wilayah Transmigrasi	2	Jumlah wilayah yang dilakukakan monitoring dalam rangka pengembangan Transmigrasi	3	LOK
3	Terwujudnya kesehatan masyarakat dan Lingkungan serta gizi keluarga transmigran di UPT	3	Jumlah UPT yang memperoleh layanan kesehatan dan kesehatan lainnya	1	UPT BINA
4	Terwujudnya peningkatan pendapatan warga transmigrans di UPT Bina melalui pengembangan sektor yang produktif	4	Jumlah masyarakat transmigran yang memperoleh bantuan pengembangan produksi petani dan peternakan	1	UPT BINA
5	Terwujudnya peningkatan ekonomi warga transmigrans di UPT Bina melalui usaha rumah tangga yang lebih produktif	5	Jumlah UPT Binaan yang mendapatkan bimbingan pengembangan ekonomi melalui home industri	1	
III	Tersedianya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	Penyediaan informasi dan promosi dalam Bidang Ketransmigrasian		77%	
1	Terwujudnya penyelesaian kasus dan permasalahan yang terjadi di lokasi transmigrasi	1	Jumlah permasalahan yang ditangani di lokasi UPT	8	KAB
2	Tersedianya informasi perkembangan pemukiman transmigrasi di Provinsi Jambi	2	Meningkatnya informasi UPT melalui publikasi potensi dilokasi UPT	1	KAB
3	Terwujudnya Percepatan Pengembangan pembangunan wilayah Transmigrasi	3	Jumlah perkembangan wilayah pembngunann Trasn migrasi	3	KAB

**RIVIEW TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2018
UPTD BPTT DINAS NAKERTRANS**

TARGET SASARAN : PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

I	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pelatihan bagi tenaga kerja	Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik	
1	Terwujudnya peningkatan keterampilan bagi pencari kerja	1 Jumlah pencari kerja yang memperoleh keterampilan kerja	176 org
2	Terwujudnya peningkatan keterampilan bagi pencari kerja	2 Jumlah pencari kerja yang memperoleh keterampilan kerja melalui Mobil Training Unit (MTU)	112 org

**RIVIEW TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DINAS**

TARGET SASARAN : PENINGKATAN PELAYANAN APARATUR

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien serta berdayaguna dalam rangka menunjang pelayanan SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam menunjang kinerja organisasi	100 %
1	Terwujud pelayanan dan pengolahan Surat Menyurat	1 Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	300 lbr
2	Terwujudnya penyelesaian pembayaran pembebanan rekening air, listrik dan telepon Kantor	2 Jumlah kebutuhan rekening fasilitas kantor yang diselesaikan	3 paket
3	Terwujudnya pengelolaan Administrasi Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan	3 Jumlah personil yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan	14 org
4	Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor dan tempat kerja	4 Jumlah personil yang dibutuhkan dalam mengelola kebersihan kantor dan lingkungan tempat kerja	1 paket
5	Terwujudnya ketersediaan ATK sebagai peralatan kerja	5 Banyaknya Alat Tulis Kantor yang disediakan	4 Trw
6	Tersedianya Bahan habis pakai dan penggandaan	6 Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan selama 1 tahun	13 jenis
7	Tersedianya Bahan habis pakai komponen listrik	7 Jumlah Komponen dan peralatan listrik dan elektronik yang dibutuhkan selama 1 tahun	1 paket
8	Tersedianya Bahan-bahan bacaan pada perpustakaan kantor	8 Jumlah bahan bacaan yang disediakan dalam perpustakaan kantor	1 paket

9	Tersedianya Kebutuhan makan dan minum tamu	9	Jumlah makan dan minum yang disediakan dalam rangka kebutuhan Rapat-rapat dalam kantor	4 trw
10	Terwujudnya sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan bidang terkait	10	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	1 paket
II	Terwujudnya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas pelayanan	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dalam menunjang pelayanan		100 %
1	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	1	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor	1 paket
2	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	2	Jumlah meubeleu yang disediakan	1 paket
3	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	3	Jumlah komputer yang disediakan	3 buah
4	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	4	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara dan diperbaiki	2 unit
5	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	5	Jumlah Kendaraan dinas yang dilakukan perawatan dan diperbaiki	17 buah
6	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	6	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dan diperbaiki	38 unit
III	Terwujudnya motivasi kerja aparatur dalam memberikan pelayanan	Meningkatnya dorongan dan disiplin aparatur dalam menunjang pelayanan yang lebih optimal		100 %
1	Terwujudnya pelayanan aparatur dalam menunjang kinerja	1	Jumlah pakaian kerja yang disediakan bagi aparatur sipil negara	210 stell
V	Terwujudnya pengetahuan aparatur dalam meningkatkan pelayanan	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal		100 %
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan aparatur	1	Jumlah pelayanan adm. Kepegawaian dan keikutsertaan aparatur dalam kegiatan pelatihan dan kursus singkat di luar kantor	3 keg
2	Terwujudnya data terpadu bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi secara dinamis	2	Jumlah bank data yang disiapkan selama 1 tahun	1 buku
3	Terwujudnya pembinaan jasmani dan rohani aparatur	3	Jumlah pelayanan pembinaan jasmani dan rohani	3 keg
V	Terwujudnya kinerja pelayanan dalam pengelolaan pelaporan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyusunan data laporan kinerja organisasi		100 %

1	Terwujudnya pengelolaan laporan organisasi	1	Jumlah aporan yang disiapkan selama 1 tahun	5	lap
---	--	---	---	---	-----



BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****1. Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional****a. Tujuan**

Telaahan terhadap kebijakan nasional bertujuan untuk mensinergikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian. Hal ini dimaksudkan agar arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah dapat diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dengan demikian akan lebih memudahkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam pengimplementasiannya secara berkesinambungan sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah.

b. Agenda Rencana Pembangunan Nasional

Penyelenggaran pembangunan nasional merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan proses pembangunan daerah, dimana daerah merupakan wilayah otonomi yang diberikan amanat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI, hal ini sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara

menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

c. Sembilan Agenda Prioritas Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara nasional masih ditemui terjadinya ketimpangan pembangunan diberbagai daerah, hal ini ditandai dengan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan, yang dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah (a) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan, dan (b) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*), serta (c) penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk pekerjaan.

Dengan demikian upaya mengisolasi persoalan tenaga kerja pada mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, serta peningkatan akses dan produktivitas mesti segera diupayakan jalan keluarnya. Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial.

Selain itu memasuki MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil di antara negara ASEAN. Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja akan

menjadi aset berharga untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan.

Bagi daerah, kesiapan dalam menghadapi MEA 2015 berbagai hal harus terus diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi kesiapan menghadapi berbagai hambatan, tantangan maupun peluang bagi daerah, terutama dari sektor ketenagakerjaan. Dalam program prioritas yang sudah dan tentunya masih akan dilakukan oleh Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi ke depan dalam menghadapi kondisi ini, akan mempersiapkan tenaga kerja ahli yang bersertifikasi, menciptakan wirausahawan yang tangguh dan kompetensi tenaga kerja yang lebih handal, serta pemantauan Teknologi Tepat Guna (TTG), selain itu meningkatkan aksesibilitas lembaga pelatihan pemerintah (BLK) dalam mempersiapkan pencari kerja di berbagai kejuruan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

1. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui strategi:
 - (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga secara positif dengan **pengurangan kesenjangan antar wilayah**; (ii) peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok; **(iii) peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun; (iv) penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang; (v) ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah; (vi) ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional; (vii) peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat; (viii) dan penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.**

2. **Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial**, melalui strategi: (i) peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi; (ii) peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (iii) peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horisonal dan rendahnya tingkat kriminalitas; (iv) peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk; (v) peningkatan pelaksanaan demokrasi (indek demokrasi); (vi) dan pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) penurunan emisi GRK); (iii) penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

Integrasi Isu-isu strategis ke dalam RPJMD Tahun 2016-2021

1) Isu Global

- a. Asean Economic Community 2015

- b. AFCTA, IMT-GT, IMS-GT
- c. SDGs
- d. Perubahan iklim

2) Isu Nasional

- a. Pembangunan Dan Perdagangan Nasional Serta Regional
- b. Kedaulatan Pangan Dan Energi
- c. Membangun Dari Desa
- d. Poros Maritim Dunia
- e. Kemiskinan
- f. Revolusi Mental
- g. Isu Regional

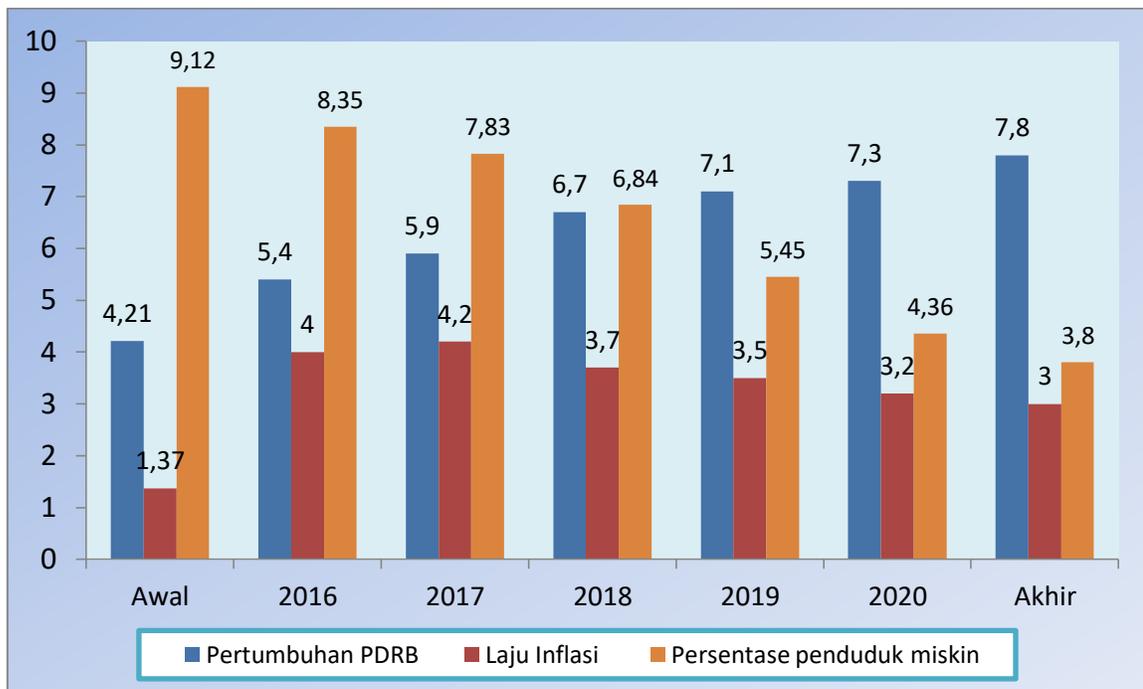
3) Isu Regional

- a. Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Prov. Riau, Bengkulu, Kepri, Sumsel dan Sumbar
- b. Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan.
- c. Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi
- d. Pemberdayaan masyarakat penyangga, TNB, TNBT dan TNKS.
- e. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi
- f. Potensi konflik Perambahan lahan Masyarakat
- g. Gangguan keamanan disepanjang lintas timur.

4) Isu Daerah

- a. Tata kelola pemerintahan
- b. Daya saing SDM
- c. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
- d. Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur
- e. Kesejahteraan masyarakat

3. Sasaran Pembangunan Nasional untuk Provinsi Jambi



4. Visi RPJP-D Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

Visi RPJP-D Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah **JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**, dengan 6 misi yaitu :

1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif
2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya
3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum
4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Tahun 2016-2021 merupakan pembangunan jangka panjang tahap ke tiga, sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJP-D Provinsi Jambi, maka sasaran pada tahap ke tiga ini adalah :

1. Pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat ;
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta
3. perkembangan penerapan IPTEK

Dalam penjabaran visi RPJD-D tahap ketiga, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan 5 misi yang menjadi sasaran prioritas Pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2016-2021, yaitu :

1. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan SDM yang berdaya saing dan berbudaya
3. Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, Mandiri dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan peningkatan Good Government dan Demographic Government.

5. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

a. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode tahun 2016-2021 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi implemmentasi kebijakan sampai dengan tahun 2021, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan enam misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2016-2021, adalah :

**TERWUJUDNYA JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN,
TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA**

"JAMBI TUNTAS 2021"

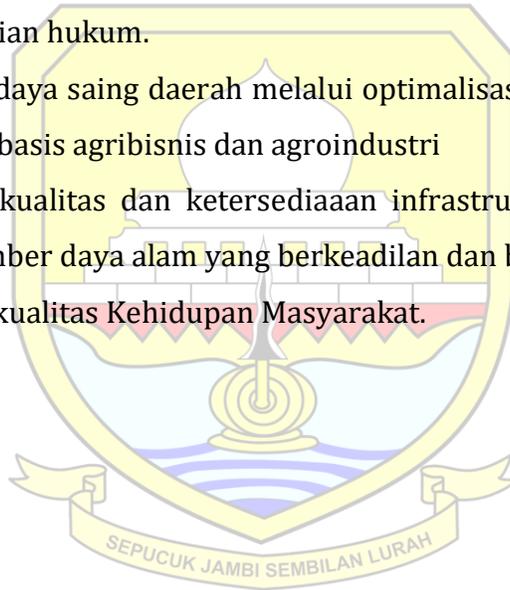
Penjelasan Visi berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

VISI	URAIAN VISI
PROVINSI JAMBI YANG TERTIB	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis .
PROVINSI JAMBI YANG UNGGUL	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing.
PROVINSI JAMBI YANG NYAMAN	Terwujudnya kehidupan masyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif
PROVINSI JAMBI YANG TANGGUH	Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi.
PROVINSI JAMBI YANG ADIL	Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah
PROVINSI JAMBI YANG SEJAHTERA	Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

b. Misi

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan jaminan kepastian hukum.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri
5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat.



6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Provisi Jambi 2019

Visi SKPD

" Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021"

Makna dari pernyataan "Visi" tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, mengandung arti bahwa ketenagakerjaan merupakan sumber inventasi ekonomi yang di harus diwujudkan dalam usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong peningkatan produktivitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja serta dapat menciptakan iklim perlindungan kerja yang sehat dan aman. Tujuan dari visi ini adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Jambi, melalui sinergi antar sektor dan stake holder terkait yang akan berimplikasi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Ketransmigrasian, mengandung arti bahwa keteransmigrasian merupakan potensi yang besar untuk di optimalkan kembali untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan antar desa dan kota. Tujuan dari visi ini adalah agar masyarakat transmigrasi dapat meningkatkan pengelolaan potensi dan sumber-sumber daya lokal yang ada di lokasi transmigrasi

secara produktif untuk membuka aksesibilitas bagi pusat-pusat pertumbuhan desa dan wilayah serta membuka kesempatan masyarakat untuk ber-transmigasi.

a. Pernyataan Misi

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, yaitu :

- a. **Misi 1** : Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- e. **Misi 2** : Mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- f. **Misi 3** : Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif.
- g. **Misi 4** : Mendorong pengembangan kawasan transmigrasi.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dihadapi.

a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
- b. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
- d. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
- e. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
- f. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
- g. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
- h. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- i. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
- j. Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
- k. Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- l. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.
- m. Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Ketrasmigrasian, antara lain :

- a. Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
- b. Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
- c. Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.
- d. Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketrasmigrasian

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian di daerah Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja.
- b. Terwujudnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja pencari kerja yang memiliki kompetensi.
- c. Terwujudnya ketersediaan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja
- l. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan peningkatan SDM Tenaga Kerja
- m. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Transmigrasi, antara lain :

- a. Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ditempati warga transmigran yang kondusif.
- b. Terwujudnya kesejahteraan warga transmigran
- c. Terwujudnya pusat pertumbuhan dalam mendorong lapangan kerja dan produksi
- d. Tersedianya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Tujuan, Strategi, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI RPJMD ke IV : Meningkatkan Daya Saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan			
MISI SKPD ke I : Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja			
Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya-upaya efektif dalam mendorong perluasan kesempatan kerja dalam dan luar negeri melalui pengembangan mekanisme penempatan tenaga kerja. • Peningkatan kerjasama dalam perluasan kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun jaringan informasi pasar kerja yang dapat diakses oleh pencari kerja • Mendorong sektor terkait dalam penyerapan tenaga kerja melalui koordinasi lintas K/L dan Stake holder. • Mengembangkan skema yang efektif dalam mendorong produktivitas tenaga kerja.
MISI RPJMD ke IV : Meningkatkan Daya Saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu			

pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**MISI SKPD ke II : Mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja**

Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pencari kerja yang memiliki kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatkan kapasitas BLK dalam penyelenggaraan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat. • Peningkatan kompetensi instruktur dan peserta pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan akses informasi pelatihan secara luas. • Merencanakan jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja • Membangun kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja, baik swasta, masyarakat maupun perguruan tinggi. • Meningkatkan fasilitas penunjang pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan global.
Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat	Terwujudnya peluang kerja bagi pencari kerja	Peningkatan sumber daya dan potensi lokal masyarakat yang ada untuk dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi guna membuka kesempatan kerja	Menyiapkan skema pelatihan keterampilan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang.

Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja dalam berusaha yang berkualitas	Peningkatan kemampuan wirausaha dalam upaya mendorong daya saing produk	Memberikan pola keterampilan dengan model kewirausahaan yang berkualitas dan memenuhi standar
Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif	Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam berusaha	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat	Menggali sumber-sumber usaha yang produktif untuk dikembangkan dalam model pelatihan
Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terwujudnya peningkatan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga	Peningkatan keterpaduan program pelatihan yang dapat membuka peluang kerja	Memberikan bantuan program kerjasama dalam pengembangan lembaga pelatihan swasta
Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja	Terwujudnya peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri	Pembekalan bagi calon peserta magang ke luar negeri dan dalam negeri melalui seleksi, sosialisasi dan pemantapan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan formasi dan kebutuhan peserta magang yang dibutuhkan. • Menyiapkan skema pembiayaan bagi peserta magang ke luar negeri • Membangun Pusat Laboratorium Pelatihan Bahasa Asing (Inggris, Korea, Jepang dan Arab)
Melaksanakan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Terwujudnya lembaga pelatihan yang terakreditasi	Peningkatan kompetensi lembaga pelatihan dalam	Memberikan kemudahan bagi lembaga pelatihan kerja dalam proses

	dalam penyelenggaraan pelatihan	menyelenggarakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.	akreditasi sesuai yang dipersyaratkan
Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja	Terwujudnya pengelola dan instruktur pelatihan yang berkualitas dan profesional	Penguatan kapasitas SDM yang berkualitas dalam menyelenggarakan program pelatihan kerja	Melakukan upgrading sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki
Meningkatkan Kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja	Terwujudnya sertifikasi kompetensi instruktur dan lulusan pelatihan kerja	Peningkatan peluang kerja yang memenuhi standarisasi pasar MEA yang kompetitif	Membuka kesempatan bagi instruktur dan tenaga kerja untuk dilakukan uji kompetensi secara bertahap setiap tahunnya.
MISI SKPD ke III : Mendorong peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif			
Meningkatkan Peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Penguatan Peran Lembaga Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rangka mendorong terwujudnya pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yang seadil-adilnya	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan bagi tenaga kerja dalam memperoleh akses pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial lainnya. • Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga perlindungan sosial ketenagakerjaan
Meningkatkan ketenangan	Terwujudnya pelaksanaan	Peningkatan kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan bagi

bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan	pengawasan ketenagakerjaan	pengawasan ketenagakerjaan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pekerja terburuk anak, aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan persyaratan ketenagakerjaan lainnya	perusahaan dalam penerapan SMK3. <ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan sanksi hukum bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.
Meningkatkan Penerapan Norma-norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja	Penerapan Norma-norma ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan-undangan secara konsisten guna pemenuhan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan untuk mencegah terjadinya kasus hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi dan Per-UU dalam bidang ketenagakerjaan secara efektif. • Mengumpulkan bahan kebijakan yang diperlukan dalam penentuan skala upah.
MISI SKPD KE IV : Mendorong pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi sebagai kawasan pengembangan ekonomi antar kota dan desa			
Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa	Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ ditempati warga transmigran yang kondusif	Peningkatan potensi desa yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi	Memperluas akses penempatan transmigrasi ke lokasi-lokasi transmigrasi pengembangan
Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan	Terwujudnya kesejahteraan warga transmigran	Peningkatan pemberdayaan usaha yang produktif sebagai	Menyesuaikan jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan dan diberdayakan di

transmigran.		penyanggah ekonomi warga transmigrasi	lokasi UPT Bina
Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif	Terwujudnya pusat pertumbuhan dalam mendorong lapangan kerja dan produksi	Percepatan pengembangan KTM sebagai pusat kawasan pertumbuhan	Mendorong sektor terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam merealisasikan percepatan pusat pertumbuhan KTM yang perlu dikembangkan
Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian	Tersedianya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	Penyediaan informasi dan promosi dalam Bidang Ketransmigrasian	Mempromosikan perkembangan pembangunan wilayah transmigrasi melalui Transmigrasi Expo

3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jambi adalah untuk mencapai bidang pembangunan :

a. Ketenagakerjaan, yaitu

- Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.

- Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
- Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
- Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
- Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
- Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
- Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
- Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
- Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
- Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.
- Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b. **Ketransmigrasian**, yaitu

- Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa.
- Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi.
- Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif.
- Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian

Strategi, Bidang Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

1). Meningkatkan peluang kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja, dengan cara :

- Meningkatkan mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja.
- Memperluas akses kesempatan kerja dalam dan luar negeri.
- Memperluas Kesempatan Kerja Sektor Informal melalui Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB)
- Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing.
- Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang penempatan tenaga kerja.
- Melakukan penyuluhan bagi Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
- Menyusun analisa dan rekomendasi peluang kesempatan kerja pada sektor usaha informal yang produktif.
- Mengevaluasi hasil capaian dan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Jambi
- Memberdayakan tenaga kerja mandiri terdidik dan tenaga kerja Pemuda Mandiri (TKPMP)
- Mendayagunakan Tenaga Kerja Sarjana (TKS).
- Memberdayakan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif.
- Penguatan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK)/Bursa Kerja Swasta.
- Meningkatkan kualitas Fungsional Pengantar Kerja dan Antar Kerja.
- Mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Menyediakan informasi pasar kerja (IPK).
- Meningkatkan Koordinasi Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.

- Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah melalui Rapat Kerja Teknis dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja.
 - Menyusun kerangka rekomendasi kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja melalui monitoring sektor formal dan informal.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelatihan Kerja, dengan cara :
- Peningkatkan pelayanan pelatihan bagi pencari kerja di Balai Latihan Kerja berbasis Kompetensi.
 - Peningkatan Pelayanan Pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobile Training Unit (MTU) ke Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga instruktur pada Balai Latihan Kerja.
 - Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja non konstruksi yang disertifikasi sesuai kompetensi.
 - Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja dalam rangka menunjang pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)
 - Melaksanakan Kompetisi bagi Instruktur di BLK/LPKS.
 - Mendorong peningkatan kualitas pengelola pelatihan dan instruktur melalui upgrading.
 - Memonitor hasil pelaksanaan pelatihan di BLK bagi tenaga kerja yang telah terserap di pasar kerja.
- 3) Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif, dengan cara :

- a. Melakukan uji kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja;
 - b. Mendorong produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan produktivitas tenaga kerja yang berorientasi dari produktivitas rendah ke produktivitas yang tinggi.
 - c. Mendorong peningkatan kewirausahaan produktif
 - d. Menyiapkan skema pembiayaan dan SDM yang berkualitas untuk mengikuti pemagangan ke luar negeri pada sektor industri dan tenaga medis/perawat
 - e. Menyediakan akses program pemagangan dalam negeri.
 - f. Meningkatkan koordinasi ke luar negeri dalam rangka pengiriman dan penempatan peserta magang.
- 4) Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan cara :
- a. Mendorong perluasan kepersertaan BPJ Ketenagakerjaan
- 5) Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan, dengan cara :
- a. Menurunkan jumlah pekerja anak di Provinsi Jambi;
 - b. Menurunkan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan;
 - c. Mendorong perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan.
 - d. Meningkatkan optimalisasi dan kualitas pengawasan Norma Ketenagakerjaan
 - e. Meningkatkan penerapan K3 dan SMK3
- 6) Meningkatkan penerapan Norma-Norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan cara :
- a. Membahas hasil survey KHL dan pengupahan (UMP).
 - b. Melaksanakan pengujian lingkungan kerja sesuai standar.
 - c. Melaksanakan pelatihan Ahli K3 Umum.

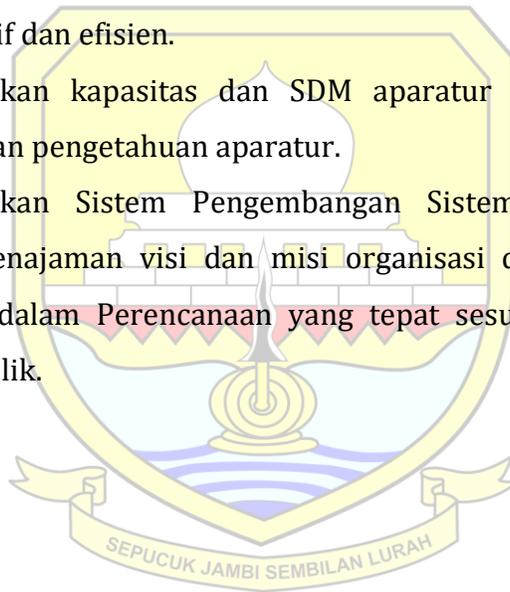
- d. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan
- e. Meminimalisir terjadinya perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Mendorong perusahaan dalam menyusun struktur dan skala upah.
- g. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
- h. Meningkatkan fungsi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
- i. Melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan.

Strategi, Bidang Ketransmigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan wilayah transmigrasi berbasis masyarakat desa, dengan cara meningkatkan penyediaan lahan bagi penempatan transmigrasi.
- 2) Mendorong peningkatan usaha produktif bagi warga binaan transmigrasi, dengan cara :
 - a. Meningkatkan pemanfaatan lahan usaha yang ada.
 - b. Meningkatkan jumlah UPT binaan yang melaksanakan kegiatan usaha produktif pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang cocok dengan lokasi penempatan serta usaha home industri lainnya.
 - c. Meningkatkan kesiapan mental dan spiritual warga transmigran dalam kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dasar lainnya
- 3) Mendorong pengembangan kawasan KTM yang produktif, dengan cara mempercepat keberfungsian Kawasan KTM yang lebih produktif melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang cepat tumbuh dan mendorong percepatan pertumbuhan kawasan
- 4) Meningkatkan penyediaan layanan informasi bidang ketransmigrasian, dengan cara mempromosikan perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi melalui transmigrasi expo.

Strategi, Bidang Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa peroleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi Jambi Tuntas 2016-2021 melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib tenaga kerja serta 1 (satu) urusan pilihan bidang ketransmigarian, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Adapun Program-program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dilingkungan Dinas.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase

peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan program, keuangan dan asset dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

6. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi.

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA

Program Pemberdayaan Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan.

8. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKEJAAN .

Program Perlindungan dan Peningkatan SDM Tenaga Kerja, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase penurunan pelanggaran kasus norma – norma tenaga kerja.

9 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

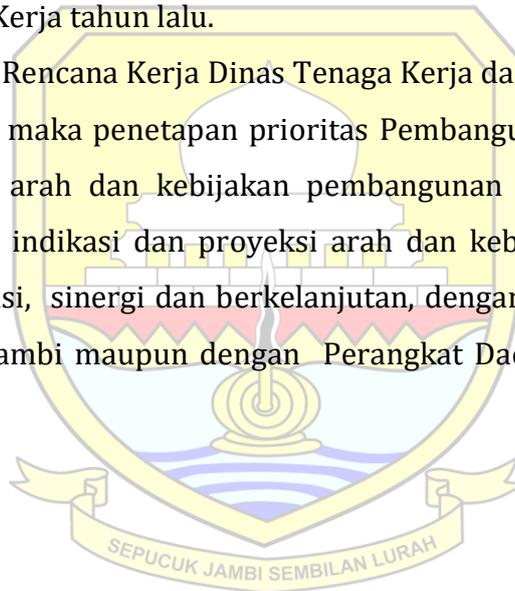
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan penempatan transmigran sesuai calon lokasi penempatan.

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2019 ini, maka penetapan prioritas Pembangunan Perangkat Daerah tetap memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang menjadi kewenangannya, serta indikasi dan proyeksi arah dan kebijakan periode 5 tahun berikutnya, terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.



Rumusan Rencana Akhir Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KETENAGAKERJAAN					
1	Program Pemberdayaan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	Provinsi Jambi	30%	1.515.807.002
	Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal Bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB) dan padat karya infrastruktur dan produktif	Jumlah WUB yang dibentuk	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	40 org	171.261.000
	Pengembangan dan perluasan kerja dalam dan luar negeri melalui penempatan tenaga kerja AKL, AKAD, TKI, TKA dan informasi pasar Kerja (IPK)	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	2000 org	725.184.598
	Penyuluhan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Keluar Negeri bagi Tenaga Perawat dan Perawat Lansia	Jumlah CTKI yang diberikan penyuluhan	11 Kabupaten/Kota	180 org	80.000.000

			Provinsi Jambi		
	Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS)	Jumlah TKS yang didayagunakan	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	12 org	255.502.304
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penempatan	Jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	30 Org	50.000.000
	Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah masyarakat yang menggunakan TTG	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	40 org	194.085.100
	Monitoring dan Pembinaan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal	Jumlah dokumen yang menggambarkan ketenagakerjaan	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	1 Dok	39.774.000
2	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	2,80%	2.365.087.269
	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) umum	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	250 Org	341.408.300

	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Masyarakat/Mobile Training Unit (MTU) dan pelatihan kerja masuk Desa	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	150 Org	487.530.700
	Pelatihan Kewirausahaan Produktif	Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	120 Org	300.680.000
	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	100 org	149.159.000
	Pemagangan Dalam dan Luar Negeri dan seleksi	Jumlah calon peserta magang yang diseleksi	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	50 org	734.274.538
	Sertifikasi Kompetensi bagi lulusan lembaga pelatihan (BLK dan LPKS)	Jumlah Instruktur, peserta pelatihan dan perusahaan yang diberikan sertifikasi	Bungo, Kerinci, Sarolangun, Tanjab Timur dan Provinsi Jambi (5 Kabupaten yang memiliki	39 org	130.000.000

			BLK)		
	Pendidikan dan pelatihan bahasa asing bagi calon tenaga kerja dan magang ke luar negeri	Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa asing	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	96 orang	142.034.731
	Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan (subsidi Program) dengan LPKS	Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dengan LPKS	Provinsi Jambi	2 Paket (32 Org)	80.000.000
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Lembaga	Persentase penurunan pelanggaran norma-norma tenaga kerja	Provinsi Jambi	66%	1.235.905.142
	Sosialisasi Bulan K3 Tahun 2019 dan Penghargaan K3	Meningkatkan budaya kerja sesuai prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja	Lokasi ditentukan sesuai kesepakatan	1 paket, 60 perusahaan	120.900.000
	Pengujian Lingkungan Kerja	Jumlah titik pengujian	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	200 Ttk	33.093.500
	Pengawasan terhadap pekerja anak	Jumlah anak yang diawasi dilingkungan perusahaan	5 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	1 Pkt	36.114.500

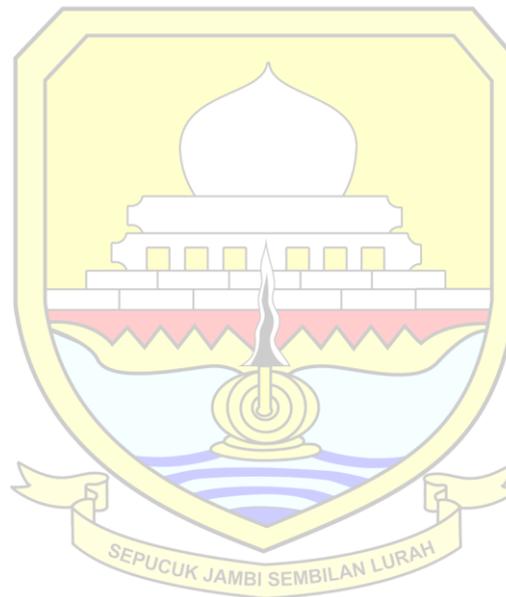
	Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Sosialisasi Perpu Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Norma Ketenagakerjaan	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	20 org unsur perusahaan dan 120 perusahaan	298.292.000
	Penegakan Hukum/Penyidikan di Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	3 Kasus	160.000.000
	Pelaksanaan Pelatihan Ahli K3 Umum	Jumlah peserta yang diberikan pelatihan Ahli K3 Umum	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	20 Org/perusahaan	139.907.500
	Pengembangan Mekanisme LKS tripartit dan hari Buruh Seluruh Indonesia (May Day)	Meningkatnya hubungan industri yang harmonis dan kondusif	11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	1 Paket	198.877.900
	Penetapan UMP Tahunan	Terlaksananya Struktur dan Skl upah , penetapan UMP dan pelaksana UMP	Provinsi Jambi	1 Paket	248.719.742
URUSAN PILIHAN BIDANG KETRANSMIGRASIAN					
4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase peningkatan penempatan transmigrasi sesuai calon lokasi penempatan	Provinsi Jambi	7%	1.003.480.163
	Pengembangan Hasil Produksi Petani Transmigran dan Peternakan	Jumlah paket kegiatan pengembangan	1 Kab (Kab. Srl)	1 UPT	113.427.663

	Penanganan Masalah Di Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi	(Srl, Tebo, Bungo, Kerinci, Ma.jambi, TJ Timur)	8 Kabupaten	350.000.000
	Publikasi Melalui Informasi Potensi Lokasi dan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah publikasi	2 Prov (Jatim, Jogja) 3 Kab (Blitar, Pacitan, Kulun Progo)	1 Paket	100.000.000
	Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Usaha Home Industri di UPT	Jumlah kelompok yang dibina	1 Kab (Kab. Srl)	1 UPT	100.215.000
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta Gizi Keluarga Transmigran di UPT	Mewujudkan derajat kesehatan dan kebutuhan gizi keluarga transmigran pada UPT binaan	1 Kab (Kab. Srl)	1 UPT	98.837.500
	Monitoring Pembangunan Pemukiman dan STP dan Pendaftaran dan Seleksi TPS	Jumlah lokasi transmigrasi	1 Kab (Kab. Ma Jambi)	1 Paket	71.000.000
	Penyiapan Areal Transmigrasi	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	3 Kab (Tj Timur, Bthari,Srl)	1 Paket	50.000.000
	Pengembangan Mental Spiritual, Pemberdayaan Perempuan Transmigran di UPT	Jumlah paket pembinaan dan pengembangan	1 Kab (Kab. Srl)	1 UPT	70.000.000
	Monev Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Dokumen hasil monitoring	1 Kab (Kab. Srl)	2 Paket	50.000.000

URUSAN RUTIN SEKRETARIAT DINAS					
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan yang diberikan	Provinsi Jambi	82%	1.101.522.300
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikelola	Provinsi Jambi	80%	10.000.000
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening	Provinsi Jambi	100%	370.400.000
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah adm. Pengelolaan keuangan	Provinsi Jambi	100%	169.573.600
	Kegiatan Penyediaan perlengkapan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah paket pelayanan jasa kebersihan kantor	Provinsi Jambi	1 Paket	152.000.000
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Provinsi Jambi	80%	50.988.700
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan	Provinsi Jambi	80%	40.000.000
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Provinsi Jambi	85%	24.160.000
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Provinsi Jambi	100%	52.000.000
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan minum rapat	Provinsi Jambi	75%	10.000.000
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Provinsi Jambi	70%	222.400.000
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang disediakan	Provinsi Jambi	80%	814.800.600
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor	Provinsi Jambi	10 Paket	220.270.000
	Kegiatan pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeleur	Provinsi Jambi	1 paket	86.486.000

	Kegiatan Pengadaan komputer dan laptop	Jumlah komputer	Provinsi Jambi	1 Paket	45.679.600
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Jambi	1 Paket	183.480.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Provinsi Jambi	24 Unit	201.645.000
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dirawat	Provinsi Jambi	80%	77.240.000
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin PNS	Provinsi Jambi	100%	84.000.000
	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian PDH	Provinsi Jambi	170	84.000.000
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM	Provinsi Jambi	75%	106.696.400
	Kegiatan fasilitasi jabatan fungsional, kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Jumlah PNS yang mengikuti bintek	Provinsi Jambi	70%	31.200.000
	Penyediaan data bidang nakertrans dalam rangka pemenuhan SIPD	Data - Data SIPD Nakertrans terpenuhi	Provinsi Jambi	100%	67.746.400
	Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	peningkatan pembinaan jasmani dan rohani	Provinsi Jambi	100%	7.750.000
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan	Provinsi Jambi	100%	123.448.277
	Kegiatan Penyusunan laporan rutin program dan perkembangan SKPD, penerapan SPM dan Laporan Asset dan keuangan	Jumlah dokumen laporan	Provinsi Jambi	1 Paket	123.448.277
JUMLAH					8.350.747.153

Jambi,
Juli
2018
KEPALA
DINAS,



Ir. Muhammad Fauzi. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640304 199203 1
004

REKAPITULASI EVALUASI PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 PROVINSI JAMBI

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

Kode	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-SKPD) Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (2017)			Target program & Kegiatan (Renja-SKPD) Tahun 2017	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s.d tahun 2017			
			Realisasi Target kinerja hasil program dan hasil keluaran kegiatan s/d tahun 2016	Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017		Tingkat realisasi %	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2017	Tingkat capaian realisasi target Target Renstra	
1	3	4	5	6	7	8=(7:6)	9	10=5+7	11=(10:4)	
	Urusan Ketenagakerjaan									
	Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran melalui pemberdayaan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan								
	Meningkatnya aktivitas wirausaha dalam penyerapan tenaga kerja	Jumlah WUB yang dibentuk	390 org	40 org	50 org	40 org	80 %	50 org	80 org	20,51 %
	Terwujudnya penciptaan kesempatan dan lapangan kerja di Provinsi Jambi	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	16.021 org	3.000 org	3.000 org	3.000 org	100,00 %	3.000 org	6.000 org	37,45 %

				Meningkatnya pengetahuan bagi pencari kerja sebelum ditempatkan	Jumlah CTKI yang diberikan penyuluhan	2.345 org	37 5 org	400 org	100 org	25,00 %	400 org	475 org	20,26 %
				Meningkatnya penerimaan daerah dari Retribusi Tenaga Kerja Asing	Persentase TKA yang membayar TKA	100 %	10 0 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %
				Diketuainya capaian Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan TK	1 Dok	1 Dok	1 dok	1 Dok	100 %	1 dok	1 dok	100,00 %
				Diketuainya perkembangan sektor-sektor produktif dalam penyerapan tenaga kerja	Jumlah kajian dan analisis pertumbuhan sektor produktif	1 Dok	1 Dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100,00 %
				Terwujudnya peningkatan pengetahuan stake holder dalam mekanisme penempatan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi	350 org	50 org	60 org	30 org	50 %	60 org	80 org	22,86 %
				Terwujudnya keberhasilan pencapaian program pemagangan di Luar Negeri (Jepang)	Negara Tujuan Magang (Jepang)	47 org	6 org	7 org	7 org	100 %	7 org	13 org	27,66 %
				Terwujudnya peningkatan pendapatan pekerja dalam memanfaatkan penggunaan teknologi yang lebih produktif dan efisien	Jumlah masyarakat yang menggunakan TTG	730 org	60 org	100 org	40 org	40 %	100 org	100 org	13,70 %
				Tersedianya dokumen laporan tentang Informasi Pasar Kerja di Provinsi Jambi	Jumlah informasi yang disebar	720 buku	120 org	120 buku	200 org	167 %	120 buku	320 buku	44,44 %
				Tersedianya data perkembangan sektor formal dan informal di	Jumlah dokumen yang menggambarkan	1.200 data	200 data	200 data	200 data	100 %	200 data	400 data	33,33 %

				Provinsi Jambi	kondisi ketenagakerjaan								
				Terwujudnya kemandirian tenaga kerja	Jumlah TKMK	590 org	Org	50 org	50 Or g	100 %	50 org	50 org	8,47 %
					Jumlah TKMP	610 org	20 Org	50 org	50 Or g	100 %	50 org	70 org	11,48 %
				Terwujudnya pendayagunaan bagi tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sarjana (TKS) sebagai tenaga pendamping dalam bidang perluasan kesempatan kerja	150 org	org	20 org	12 or g	60 %	20 org	12 org	8,00 %
				Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Jumlah kompetensi jabatan dalam perusahaan	150 org	org	30 org	30 or g	100 %	30 org	30 org	20,00 %
				Terwujudnya sinergitas dalam penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang melaksanakan Rakornis	500 org	org	100 org	100	100 %	100 org	100 org	20,84 %
				Terwujudnya peluang kerja bagi pencari kerja dan daya saing tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi								
				Terwujudnya kualitas pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja	1.680 org	162 pkt	200 org	204 or g	102 %	200 org	366 org	21,79 %
					Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja melalui MTU	1.628 org	128 org	200 org	48 or g	24 %	200 org	176 org	10,81 %

				Terwujudnya peningkatan produktivitas wirausaha	Jumlah wirausaha yang lebih produktif menyerap tenaga kerja	1.380 org	persh	200 org	180 org	90 %	200 org	180 org	13,04 %
				Terwujudnya kerjasama dan sinergi antar lembaga pelatihan	Jumlah LPKS	335 org	54 org	52 org	52 pr sh	100 %	52 org	106 org	31,64 %
				Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja untuk peningkatan produktivitas	1.105 org	10 org	150 org	120 org	80 %	150 org	228 org	20,63 %
				Meningkatnya peserta magang yang memperoleh pembekalan	Jumlah calon peserta magang yang diseleksi	915 org	360 org	125 org	240 org	192 %	125 org	600 org	65,57 %
				Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang bersertifikasi	Jumlah Instruktur, peserta pelatihan dan perusahaan yang diberikan sertifikasi	2.000 org	100 org	300 org	64 org	21 %	300 org	64 org	3,20 %
				Meningkatnya kemampuan tenaga kerja dalam penguasaan bahasa asing	Jumlah peserta yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bahasa	1.600 org	100 org	200 org	40 org	20 %	200 org	40 org	2,50 %
				Tersedianya data perkembangan ketenagakerjaan di Daerah	Jumlah dokumen profil ketenagakerjaan provinsi jambi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100,00 %
				Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penurunan pelanggaran norma-norma tenaga kerja					-			
					Meningkatkan budaya kerja sesuai prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja	1 paket, 60 perusahaan	100 %	1 paket, 60 perusahaan	1 paket, 60 perusahaan	100,00 %			

					Jumlah titik pengujian	1.350 ttk	ttk	200 ttk	200 ttk	100 %	200 ttk	200 ttk	14,81 %
					Jumlah anak yang diawasi dilingkungan perusahaan	120 org	20 org	20 org	20 org	100 %	20 org	40 org	33,33 %
					Jumlah perusahaan yang melaksanakan Norma Ketenagakerjaan	40 org unsur perusahaan dan 120 perusahaan	40 org unsur perusahaan dan 120 perusahaan	40 org unsur perusahaan dan 120 perusahaan	40 org unsur perusahaan dan 120 perusahaan	100 %	40 org unsur perusahaan dan 120 perusahaan	40 org unsur perusahaan dan 120 perusahaan	100,00 %
					Jumlah kasus yang dilakukan penyidikan	25 kss	5 kss	5 kss	2 kss	40 %	5 kss	2 kasus	8,00 %
					Jumlah peserta yang diberikan pelatihan Ahli K3 Umum	215 org	30 org	30 org	30 org	100 %	30 org	30 org	13,95 %
					Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan				-			-
					Meningkatnya peran lembaga perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan	150 org	org	30 org	30 org	100 %	30 org	30 org	20,00 %
					Jumlah peserta yang melakukan pembahasan UMP	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100 %	1 pkt	1 pkt	100,00 %

					Jumlah Lembaga Tripartit	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100 %	1 pkt	1 pkt	100,00 %	
					Urusan Transmigrasi								-	
					Tersedianya kawasan yang bisa dihuni/ditempati warga transmigran yang kondusif	Persentase peningkatan penempatan transmigrasi sesuai calon lokasi penempatan							-	
					Terwujudnya Kesejahteraan Warga Binaan Transmigran	Jumlah UPT Bina yang memperoleh pengembangan hasil produksi pertanian dan peternakan	10 UPT	2 UPT	1 UPT	1 UPT	100 %	1 UPT	3 UPT	30,00 %
						Jumlah UPT Bina yang memperoleh bantuan obat-obatan	10 UPT	2 UPT	1 UPT	1 UPT	100 %	1 UPT	3 UPT	30,00 %
						Jumlah kelompok yang dibina mendapatkan pengetahuan pengembangan usaha home indutry	10 UPT	2 UPT	1 UPT	1 UPT	100 %	1 UPT	3 UPT	30,00 %
						Jumlah kebutuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang diberikan	11 pkt	3 pkt	1 pkt	1 pkt	100 %	1 pkt	4 pkt	36,36 %
						Jumlah UPT Bina yang mendapatkan pembinaan mental Spritual	10 UPT	2 UPT	1 UPT	1 UPT	100 %	1 UPT	3 UPT	30,00 %

					Jumlah UPT Bina yang memperoleh bantuan peningkatan kualitas pendidikan dasar	8 UPT	2 UPT	1 UPT	1 UPT	100 %	1 UPT	3 UPT	37,50 %
					Jumlah Dokumen hasil monitoring	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1 dok	100,00 %
				Terwujudnya ketersediaan lahan transmigrasi	Jumlah calon lokasi yang dicadangkan	11 pkt	1 pkt	2 pkt	2 pkt	100 %	2 pkt	3 pkt	27,27 %
					Jumlah lokasi transmigrasi	9 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100 %	1 pkt	2 pkt	22,22 %
					Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	1 pkt	1 pkt	1 Pkt	1 Pkt	100 %	1 Pkt	1 Pkt	100,00 %
					Jumlah publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					Jumlah informasi yang disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100 %	1 pkt	1 pkt	100,00 %
				Terwujudnya pusat pertumbuhan dalam mendorong lapangan kerja dan produksi	Jumlah KTM yang dipantau perkembangannya	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100 %	1 pkt	1 pkt	100,00 %
				Urusan Rutin Sekretariat									

					Terwujudnya pelayanan perkantoran yang dinamis	Persentase Pelayanan yang diberikan								
						Jumlah surat menyurat yang dikelola	5.550 Lbr	800 Lbr	850 Lbr	300 Lbr	35 %	850 Lbr	1.100 Lbr	19,82 %
						Jumlah rekening	5 rek	5 rek	5 rek	3 rek	60 %	5 rek	5 rek	100,00 %
						Jumlah adm. Pengelolaan keuangan	573 org	28 org	28 org	14 org	50 %	28 org	42 org	7,33 %
						Jumlah paket pelayanan jasa kebersihan kantor	65 org	10 org	10 org	10 org	100 %	10 org	20 org	30,77 %
						Jumlah ATK yang disediakan	4 trw	4 Trw	4 Trw	4 Trw	100 %	4 Trw	4 Trw	100,00 %
						Jumlah penggandaan	527.077 lbr	77077 lbr	80000 lbr	80000 lbr	100 %	80000 lbr	157.077 lbr	29,80 %
						Jumlah komponen listrik yang disediakan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	100,00 %
						Jumlah bahan bacaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
						Jumlah penyediaan makan minum rapat	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100,00 %

					Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	
					Terwujudnya kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan kantor	Persentase sarana dan prasarana yang disediakan							
					Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	11 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	6 unit	54,55 %
					Jumlah perlengkapan kantor	54 unit	4 pkt	10 pkt	2 pkt	20 %	10 pkt	6 pkt	11,11 %
					Jumlah Meubeleur	185 unit	40 unit	30 unit	14 unit	47 %	30 unit	54 unit	29,19 %
					Jumlah komputer	59 unit	4 unit	30 unit	4 unit	13 %	30 unit	8 unit	13,56 %
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	19 pkt	2 pkt	3 pkt	2 pkt	67 %	3 pkt	4 pkt	21,05 %
					Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	289 unit	43 unit	45 unit	20 unit	44 %	45 unit	63 unit	21,80 %
					Jumlah peralatan kantor yang dirawat	671 unit	101 unit	105 unit	38 unit	36 %	105 unit	139 unit	20,72 %

					Jumlah gedung kantor yang direhab	14 pkt	2 pkt	2 pkt	2 pkt	100 %	2 pkt	4 pkt	28,57 %
					Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 pkt	- pkt	1 pkt	1 pkt	100 %	1 pkt	1 pkt	100,00 %
					Jumlah rumah jabatan kepala dinas yang dibangun	- pkt	- pkt	- pkt	- pkt	- %	- pkt	pkt	0,00 %
					Jumlah bangunan UPTD yang disediakan di Kab/Kota	5 pkt	- pkt	3 pkt	3 pkt	100 %	3 pkt	3 pkt	60,00 %
					Terwujudnya kinerja aparatur yang lebih baik	Persentase disiplin PNS							
					Jumlah pakaian PDH	2.875 stel	375 Stel	400 Stel	200 Stel	50 %	400 Stel	575 Stel	20,00 %
					Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi	Persentase peningkatan kapasitas SDM							
					Jumlah PNS yang mengikuti bintek	70 %	70 %	70 %	70 %	100 %	70 %	70 %	70,00 %
					Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang akuntabilitas	Persentase pelaporan							

					Jumlah dokumen laporan SKPD yang dihasilkan setiap tahun	18 lap	3 Lap	3 Lap	5 Lap	167 %	3 Lap	8 Lap	44,44 %
					Jumlah produk perencanaan yang dihasilkan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100 %	1 pkt	1 pkt	100,00 %

